

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Lembar Hasil Revisi Ujian Tertutup	iii
Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xvi
Intisari	xvii
Abstract	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Arti Penting Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kedudukan Prinsip Hukum Dalam Sistem Hukum	16
1. Antara Prinsip Hukum <i>atau</i> Asas Hukum	16
2. Prinsip Hukum <i>vs</i> Aturan Hukum	35

B. Konsep Sumber Daya Alam	50
C. Putusan Pengadilan	65
1. Memahami Makna Putusan Pengadilan	65
2. <i>Ratio Decidendi</i> dan Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan	69
3. Kebebasan dan Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara	75
4. Antara <i>Judicial Activism</i> dan <i>Judicial Restraint</i>	82
D. Teori Penafsiran Hukum	88
1. Arti Penafsiran Hukum	90
2. Metode Penafsiran Hukum	96
3. Penafsiran Konstitusi Bidang Sumber Daya Alam	101
BAB III METODE PENELITIAN	109
A. Jenis Penelitian	109
B. Jenis Data, Alat, dan Cara Memperolehnya	112
C. Analisis Data	126
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	130
A. Prinsip-Prinsip Hukum Pengaturan Sumber Daya Alam Yang Terkandung Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	130
1. Prinsip Berkaitan Hak Menguasai Negara	143
a. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia	143
b. Prinsip Penguasaan Negara	155
c. Prinsip Pengusahaan Oleh BUMN/BUMD	173

2.	Prinsip Berkaitan Keberlanjutan	181
a.	Prinsip Kelestarian Lingkungan Hidup	181
b.	Prinsip Keterpaduan	190
c.	Prinsip Keberlanjutan	199
d.	Prinsip Keseimbangan	205
3.	Prinsip Berkaitan Perlindungan Hak Asasi Manusia	210
a.	Prinsip Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat	210
b.	Prinsip Penghormatan Terhadap HAM	225
c.	Prinsip Non-Diskriminatif	233
d.	Prinsip Individualitas	239
e.	Prinsip Kepastian Hukum	248
4.	Prinsip Berkaitan Keadilan Sosial	257
a.	Prinsip Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat	257
b.	Prinsip Fungsi Sosial	265
c.	Prinsip Efisiensi Berkeadilan	272
d.	Prinsip Aksesibilitas	280
5.	Prinsip Berkaitan Demokrasi	288
a.	Prinsip Partisipatif	288
b.	Prinsip Pengawasan	294
c.	Prinsip Transparansi	301
d.	Prinsip Desentralisasi	307

B. Konsistensi Penjabaran Prinsip-Prinsip Pengaturan Sumber Daya

Alam Yang Terkandung Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ...	314
1. Konsistensi Penjabaran Ke Dalam Amandemen Undang-Undang Bidang Sumber Daya Alam	318
a. Penjabaran Prinsip Berkaitan Hak Menguasai Negara ...	318
b. Penjabaran Prinsip Berkaitan Keberlanjutan	338
c. Penjabaran Prinsip Berkaitan Perlindungan Hak Asasi Manusia	363
d. Penjabaran Prinsip Berkaitan Keadilan Sosial	399
e. Penjabaran Prinsip Berkaitan Demokrasi	425
2. Konsistensi Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusannya Sendiri	478
a. Konsistensi MK Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ...	478
b. Konsistensi MK Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Bidang Sumber Daya Air	493
c. Konsistensi MK Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Bidang Ketenagalistrikan	514
d. Konsistensi MK Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Bidang Perkebunan	530
e. Konsistensi MK Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	550

BAB V PENUTUP	560
A. Kesimpulan	560
B. Implikasi Teoritis	564
C. Saran	568
Daftar Pustaka	571